

Pemberdayaan Ekonomi: Suatu Upaya Penanggulangan Tindak Terorisme

Luluk Indarinul Mufidah¹

ABSTRACT

The issue of radicalism that lead to acts of terrorism is still interested to be discussed, including in Indonesia. Indeed the causes of terorisme in Indonesia, there are three namely first, ethnicity, second, religious radicalism, third, poverty and economic disadvantage. And the one alternative solution for prevent of radicalism that lead to acts of terrorism is economic environment, which that can be done by individuals, and community groups such as community organizations and so forth, and the last one is the government, has become a liability for government to create general welfare.

Key words: radicalism, Terorism and economic environment

A. Pendahuluan

Perdamaian dunia saat ini nampaknya masih menjadi mimpi bagi masyarakat dunia, hal ini terlihat dari munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengarah pada terorisme, seperti Al-Qaeda, Taliban, ISIS dan lain sebagainya yang menentang pemerintahan legal atas nama keadilan, kesejahteraan, Jihad dan lain sebagainya, sayangnya penentangan tersebut sudah mengarah pada radikalisme dengan bentuk terorisme, akibatnya banyak warga sipil yang tidak berdosa menjadi korban. Tentu tidak asing lagi jika kita melihat dan mendengar berita dimedia cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang kekerasan kelompok tertentu hingga memakan korban. Baik sejarah maupun fakta menunjukkan bukan hal yang mudah untuk menghapus kelompok ekstrem tersebut, bahkan yang ada makin hari makin bermunculan kelompok berpaham radikal yang mengarah pada

¹ Dosen Tetap dan Kaprodi PGMI Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul ‘Ula (STAIM) Nganjuk

terorisme, di beberapa negara timur tengah, eropa bahkan terakhir merembah ke ranah sebagian negara ASIA.

Di Indonesia isu tentang radikalisme terorisme sudah lama berkembang, terorisme sudah bermunculan sejak setelah beberapa tahun Indonesia merdeka, kemunculan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) sebagai akibat dari ketidakpuasan dengan pemerintahan yang ada, yang kemudian berevolusi menjadi NII (Negara Islam Indonesia), Setelah bersentuhan dengan ide-ide Ikhwan al-Muslimin, kegiatan-kegiatan NII berkembang mengikuti pola Ikhwan al-Muslimin. Salah satu simpul terpenting gerakan NII adalah Pesantren Ngruki yang didirikan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, yang kemudian membentuk Jamaah Islamiyah (JI) dengan tujuan melawan pemerintahan sekuler.

Bahkan setelah puluhan tahun bangsa ini merdeka pun, masih banyak gerakan-gerakan terorisme, tentu kita akan masih ingat di mana sebagian kecil masyarakat Aceh ingin memerdekakan dirinya dari kesatuan bangsa ini, dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sebagai tunggangannya, tak mau kalah warga papua juga mengancam akan memerdekakan diri dari NKRI. Tak lain motifnya adalah menginginkan kesejahteraan, baik secara lahiriah maupun rohaniah. Dan jika memang itu adalah motif mereka, hal tersebut merupakan hal yang wajar, keinginan kesejahteraan merupakan hal yang mendasar bagi manusia, namun cara memperoleh kesejahteraan dengan tindak terorisme tentu tidak bisa dibenarkan.

Pada dasarnya manusia sebagaimana pada penciptaanya yang terdiri dari dua unsur rohani dan jasmani, maka manusia juga mempunyai dua kebutuhan dasar, yakni kebutuhan fisiologis (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan psikologis (keamanan, ketenangan, loyalitas dan penghargaan). Kedua kebutuhan tersebut berbeda namun saling berkaitan satu dengan yang lain, jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan kebutuhan lainnya terganggu.

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba menganalisa tentang radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme mulai dari penyebab terjadinya radikalisme yang dibarengi dengan aksi terorisme di Indonesia, sampai pada upaya pencegahan aksi terorisme.

B. PEMBAHASAN

1. Memahami Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme bisa kita maknai sebagai faham, wacana atau sebuah aktivitas yang berupaya memahami sesuatu secara sistematis dan mendalam. Pemahaman yang

mendalam kadang menimbulkan sebuah keinginan untuk mengubah suatu sistem sesuai dengan pemahaman yang dimiliki, baik sistem politik, ekonomi, sosial, budaya termasuk pemahaman dalam penerapan agama. Adapun bentuk dari radikalisme dapat dibedakan menjadi dua dimensi yakni, menerima kekerasan sebagai cara yang sah untuk mengubah sistem tersebut, dan tidak menerima kekerasan dalam mengubah suatu sistem. Orang atau kelompok disebut radikal ketika ia secara aktif terlibat atau mengajak orang atau kelompok lain, untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk terorisme. Sehingga akan mengubah tatanan masyarakat yang legal.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa radikalisme tidak selamanya mengarah pada hal yang negatif atau merugikan, yakni bentuk radikalisme yang tidak menerima kekerasan untuk mencapai tujuan, justru hal ini bersifat positif. Yang bersifat negatif dan merugikan masyarakat banyak adalah radikalisme yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Dan bentuk radikalisme yang kedua inilah yang harus dihindari dan ditangkalangi, karena memaksakan kehendak orang lain dengan kekerasan, tidak sesuai dengan norma dan nilai tatanan masyarakat dunia pada umumnya termasuk Indonesia negara berideologi Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Sedangkan yang dimaksud dengan radikalisme Islam (*Islamist Radicalism*) adalah Radikalisme yang berhubungan dengan Islamisme, yaitu paham, wacana dan aktivisme yang bertujuan mengubah sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada menjadi sistem Islami. Bagi kaum *Islamist*, Islam dipahami tidak sekadar agama, tetapi juga ideologi politik, yang berdiri sejajar dengan ideologi politik besar lainnya semacam demokrasi, sosialisme dan kapitalisme². Dan terkadang tidak sedikit juga orang atau kelompok *Islamist* yang memaksakan kehendak mereka kepada orang lain dengan cara yang bertentangan dengan syariah Islam itu sendiri, seperti dengan cara menteror orang atau masyarakat.

Radikalisme tidak selamanya dapat diartikan sebagai Terorisme, namun awal dari Terorisme adalah Radikalisme. Terorisme merupakan perbuatan untuk menciptakan ketakutan ditengah-tengah masyarakat atau upaya untuk merubah sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial sesuai dengan kehendak dan tujuan pelaku terorisme.

² Hasan, Noorhaidi. *Memahami Radikalisme*. (tidak dipublikasikan)

2. Beberapa Penyebab Aksi Terorisme Di Indonesia

Bila kita membaca sejarah, mulai setelah kemerdekaan Indonesia selalu ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk melawan pemerintahan formal, sampai hari ini. Dalam pembahasan beberapa penyebab aksi terorisme di Indonesia ini penulis mengambil dari beberapa sumber, dan kemudian menyarikannya, sebagai berikut:

a. Kesukuan, nasionalisme/separatisme (*Etnicity, nationalism/separatism*)

Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja³. Tindakan terorisme yang dilakukan di daerah-daerah konflik tersebut, dikarenakan pemahanan yang rendah terhadap makna NKRI dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang berkuasa, sebuah upaya untuk mendapatkan akses dan ruang yang lebih luas lagi menjadi motif mereka.

b. Radikalisme Agama (*Religion Radicalism*)

Radikalisme agama biasanya muncul akibat adanya pemahaman keagamaan yang bercorak spiritual, yakni berdasarkan teks semata tanpa mengaitkannya dengan konteks yang mengitarinya. Pemahaman seperti ini melahirkan sikap fanatik dan militan yang berujung pada pandangan yang menganggap bahwa hanya dirinya sajalah yang benar.⁴ Menurut mantan Presiden SBY penyimpangan terhadap ajaran agama yang dianut, adalah penyebab terjadinya terorisme di Indonesia, hal ini disampaikan beliau dalam telekonferensi dengan gubernur di seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 30 Juli 2009.

Radikalisme terhadap ajaran agama yang dibarengi dengan pemahan yang sempit akan menjadikan orang tersebut mengesahkan tindak terorisme sebagai bentuk perjuangan menegakkan syariah, hal ini terlihat dari motif pelaku teroris di Indonesia yang mengatasnamakan jihad. Radikalisme agama termasuk penyebab yang tidak mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang tidak nyata, berbeda dengan kemiskinan atau ketimpangan ekonomi, yang dengan kasat mata dapat terlihat. Bentuk kekerasan atau terorisme

³ <http://politikana.com/tag/penyebab/terorisme> di akses tanggal 19 Mei 2016

⁴ <http://jurnalintelijen.net/tag/penyebab-terorisme>. di akses tanggal 18 MEI 2016

digunakan oleh pelaku teror digunakan karena mereka menganggap bahwa syariah di Indonesia belum ditegakkan secara 100% dan negeri ini sedang dikuasai oleh kekuatan hitam, dan sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini akhirnya mereka merasa terpanggil untuk membebaskan Indonesia dari “tangan-tangan hitam” tersebut.

Rentetan aksi teror Bom di Indonesia mulai dari bom Bali II 1 Oktober 2005, kemudian dua bom yang meledak hampir bersamaan di dua hotel mewah di Jakarta, Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton pada 17 Juli 2009, dan yang terakhir adalah bom kuning. Teror bom tersebut jika dilihat dari motif pelaku tidak lain adalah bermotif agama. Nasir Abbas⁵ menyebutkan bahwa para teroris menggunakan ayat-ayat kitab suci Quran yang diambil sepotong-sepotong dan kemudian dijadikan pedoman para kelompok teror dalam melakukan setiap aksi terornya terutama mengenai penyerangan serta aksi balas dendam terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang mereka anggap sebagai musuh, seperti misalnya:

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (QS: Al Baqarah, Ayat: 194).

Sedangkan ayat sebagai dasar balas dendam adalah:

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar” (QS: An-Nahl, Ayat: 126)

Hal inilah yang kemudian disebut sebagai kesalahan menginterpretasikan ajaran agama, yang kemudian menyebabkan radikalisme melalui penafsiran teks semata tanpa menghiraukan konteks, ditambah lagi dengan dasar agama yang masih lemah. Kekerasan oleh teroris dianggap sebagai “tugas mulia” atau “perbuatan suci”⁶. Dan masih banyak lagi

⁵ Nasir Abbas, Nasir. (2015, Desember 7). “Terorisme di Indonesia”. Kuliah Terorisme dan Kontraterorisme, Program Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Jakarta

⁶ Surya Bakti. 2014. *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press. Hal. 40

ayat-ayat yang dijadikan dasar dalam melegalkan tindak terorisme, jelas ini bertolak belakang dari *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariat), karena secara umum *maqasid syariah* adalah *maslahah* yakni mendatangkan semua yang bermanfaat dan menghindarkan dari yang mengandung *mafsadah*.

c. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi (*Poverty and Economic Disadvantage*)

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan masalah sosial yang mampu memantik aksi terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural berarti kemiskinan yang memang sejak awal sudah miskin disebabkan dari keturunan atau memang tidak ada kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat, sebuah keadaan yang sengaja didesain oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu, misalnya oleh pengusaha yang dengan sengaja menciptakan kemiskinan untuk mendapatkan keuntungan.

Di Indonesia kemiskinan dan kesenjangan ekonomi bukan hal baru lagi, meski Indonesia sudah menjadi negara merdeka lebih dari 70 th, namun kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih menjadi boomerang dalam perekonomian nasional. Hal ini senada dengan pemikiran SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) bahwa salah satu penyebab terorisme di Indonesia adalah kondisi kehidupan yang susah, kemiskinan absolute dan keterbelakangan ekstrim, yang konon mudah sekali dipengaruhi. Sehingga orang-orang yang masuk kategori ini mudah saja dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang ekstrim, pemahaman-pemahaman yang radikal yang dapat megarah pada tindakan terorisme, atas nama mencari keadilan sosial ekonomi.

Perekonomian Indonesia yang cenderung berpaham kapitalisme menjadikan pelaku ekonomi (pengusaha) untuk memuaskan *self interest*-nya daripada *public interest* dalam mencari laba, dan tidak jarang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pengabaian *public interest* ini tentu dapat merugikan pihak lain, baik secara moral maupun materi. Yang pada akhirnya akan menambah gap antara yang kaya dengan yang miskin. Lalu kenapa kemiskinan dapat menjadikan orang mudah untuk dimasuki doktrin-doktrin yang ekstrim? Kemiskinan akan mengarahkan orang pada rendahnya mendapatkan akses pendidikan, pendidikan yang rendah akan menyulitkan seseorang untuk memahami sesuatu dengan rasional.

Di Indonesia sendiri kemiskinan masih menjadi masalah klasik yang sampai hari ini masih menjadi kendala bagi bangsa ini untuk menjadi negara maju, impian untuk menjadi negara yang makmur dan berkeadilan sosial nampaknya masih mejadi mimpi dan harapan semata. Memang secara kuantitatif data kemiskinan menunjukkan trend yang terus menurun, namun secara kualitatif kemiskinan masih cukup tinggi, fenomena sosial pembagian zakat atau pembagian daging kurban atau pembagian bantuan sosial dari pemerintah sebut BLT (bantuan langsung tunai), maka kita akan menjumpai segerombolan atau bahkan lautan manusia yang berjubel saling berdesakan saling berebut takut jika tidak kebagian, dan bahkan tidak jarang yang menimbulkan korban akibat tidak sabar dalam antri, ini dapat dijadikan indikator bahwa kemiskinan masih cukup tinggi di Indonesia.

3. Pemberdayaan Ekonomi: Suatu Upaya untuk Menangulangi Tidak Terorisme

Pada dasarnya untuk pencegahan faham radikalisme terorisme diperlukan berbagai cara dan harus dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat sampai pada pemerintah. Namun dalam pembahasan ini, akan difokuskan pada bagaimana pemberdayaan ekonomi mampu mencegah atau sebagai alternatif dalam menangulangi radikalisme terorisme, yang tentunya pihak swasta maupun pemerintah dapat mengambil andil di dalam pemberdayaan ekonomi tersebut. Mungkin akan ada pertanyaan kenapa harus pemberdayaan ekonomi? Pada dasarnya tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat berkecukupan dalam materi dan lebih sejahtera dari sebelumnya.

Pemberdayaan menurut Suharto⁷, pemberdayaan sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang baik yang bersifat fisik, ekonomi

⁷ Edi, Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.*, Bandung: Refika Aditama. 57-60

maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Merujuk pada pengertian pemberdayaan di atas serta penyebab terjadinya radikalisme terorisme di Indonesia, maka pemberdayaan ekonomi dapat dijadikan alternatif penanggulangan dan pencegahan paham radikalisme. Bila kita amati lebih jauh, penyebab terjadinya tindak terorisme di Indonesia seperti, kesukuan, radikalisme agama serta kemiskinan, mengindikasikan bahwa belum terpenuhinya kebutuhan sebagian masyarakat baik kebutuhan akan jasmani maupun kebutuhan rohaninya, sehingga menyebabkan kurang memahami tujuan serta fungsi dari syariat Islam serta tidak mampu memahami secara rasional program dan kebijakan pemerintah, akhirnya timbul pemahaman secara radikal dan menyebabkan tindak terorisme.

Lalu, apa bagaimana serta oleh siapa pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

a. Individu

Dalam Islam yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan adalah individu tersebut, lalu keluarganya, masyarakat baru terakhir adalah Negara. Nabi Muhammad S.A.W telah memberikan tauladan kepada umatnya dan juga seluruh manusia di muka bumi ini, bagaimana Rasulullah sejak kecil selalu berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri, mulai berternak, berdagang dan pada akhirnya diangkat menjadi Rasulullah. Ini membuktikan bahwa sebagai pribadi muslim tidak patut untuk mengantungkan beban hidup kepada orang lain.

Sementara Islam memberikan suatu prespektif jangka panjang untuk perbuatan manusia, Islam tidak menghendaki individu melupakan kepentingan mereka sendiri di dunia ini, hal ini tidaklah praktis. Sistem nilai apa pun yang berlaku demikian ia tidak akan berkerja. Islam justru menghendaki individu memenuhi semua kebutuhan pokoknya agar fisik dan mentalnya tetap sehat dan efisien supaya mampu memenuhi tanggung jawabnya kepada dirinya sendiri dan masyarakat dan, dalam melakukan hal ini untuk meningkatkan seluruh potensinya. Tidak ada untungnya menghidar dari barang-barang yang telah

diberikan oleh Tuhan. Namun meski begitu manusia sebagai khalifah tidak layak bertindak ekstrim untuk menjadi manusia ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan orang lain⁸.

Jika seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya baik yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani, maka keluarganya pun juga akan tercukupi, selanjutnya orang tersebut akan mampu memperdayakan masyarakat sekitar. Jika tingkat kesejahteraan paling tinggi ini sudah tercapai maka, hampir dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan mudah masuk dalam golongan radikalisme terorisme.

b. Kelompok Masyarakat

Pemberdayaan perekonomian umat juga bisa dilakukan oleh swasta, seperti Ormas (Organisasi masyarakat), LSM, Yayasan dan pihak swasta lainnya baik yang bergerak dibidang sosial maupun profit. Mengingat kelompok-kelompok swasta atau organisasi-organisasi masyarakat, memiliki banyak anggota, dan jika masing-masing kelompok atau organisasi mampu memperdayakan ekonomi anggotanya, maka akan tercipta kesejahteraan umum. Sehingga tidak ada lagi istilah kaum *dhuafa*, dan hal ini akan mencegah anggotanya untuk masuk dalam kelompok atau golongan radikalisme yang bertindak dengan cara terorisme.

Kita ambil contoh misalnya adalah ormas NU (Nahdlatul Ulama), sebagai ormas terbesar di Indonesia, tentu program-program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh NU akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas terutama untuk anggotanya, baik dibidang sosial keagamaan maupun dibidang ekonomi dan politik. Setelah beberapa waktu NU berdiri, ditengah kondisi perjuangan dan makin banyak persoalan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdlatul Tujjar tak lagi memiliki peranan penting sebagaimana awal berdirinya. Hingga banyak persoalan kesejahteraan umat terabaikan. Untuk mengantisipasi problem ekonomi umat saat itu, sebenarnya telah dikembangkan ekonomi kerakyatan berupa koperasi.

Pada tahun 1937 Ketua PBNU, KH. Mahfoedz Siddiq mendirikan Koperasi Syirkah Mu'awwanah, kehadiran koperasi ini berupaya membuka jaringan perdagangan antar pesantren yang banyak menghasilkan produk-produk pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya. Dalam pada itu, terdapat satu departemen dari lima departemen yang ada secara

⁸ Chapra, M Umer. 1999. *Islam and The Economic Challenge*. (terj) Ihsan dan Amar. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti. , 243

khusus mengurus masalah bisnis NU. Namun kenyataannya Syirkah Mu'awwanah dan bagian khusus mengurus bisnis NU tidak mampu berperan secara maksimal dalam mengangkat perekonomian umat. Meski telah memiliki BMT SM NU dan usaha-usaha lainnya seperti koperasi An-Nisa, Koperasi Bintang Sembilan dari kelanjutan Syirkah Mu'awwanah, namun hingga kini manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal oleh warga NU⁹.

Ini membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi umat tidak semudah membalikkan tangan, butuh SDM yang berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi, upaya pemberdayaan melalui koperasi yang dibangun mulai sebelum kemerdekaan, nyatanya belum mampu memberi peran yang berarti untuk anggotanya, hingga kini muncullah koperasi-koperasi pesantren yang berjalan secara sporadis, Koperasi Pesantren Sidogiri di Pasuruan, misalnya telah membuka lebih dari 10 cabang, An-Nuqoyah di Guluk-guluk Sumenep, Nurul Jadid di Paiton Probolinggo, Pesantren Sunan Drajat di Lamongan dan masih banyak lagi lainnya.

Sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan oleh NU dalam membantu meningkatkan kesejahteraan warganya, contoh banyak warga NU yang berprofesi sebagai petani, dengan masa yang banyak, maka Lembaga NU dapat melindungi harga jual warganya. Atau misalkan berprofesi sebagai pelaku UMKM maka Lembaga NU dapat membantu dengan pemberian modal dan pelatihan teknis. Cukup sederhana memang namun, itu semua membutuhkan usaha, kerja keras dan kepercayaan antara lembaga NU dan warganya.

c. Pemerintah

Peran dan fungsi pemerintah tidak hanya menghukum siapa yang bertindak merugikan orang lain, atau menangkap dan mengadili pelaku terorisme, namun lebih luas dari itu, pemerintah harus mampu mencegah terjadinya tindak terorisme. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi banyak tugas bagi pemerintah, yakni mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, memperdayakan para pelaku ekonomi dan lain sebagainya. Karena memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi, Jika pasar gagal dalam menyediakan barang publik dan kesejahteraan umum, maka jalan tengahnya adalah pihak swasta (masyarakat) dan pemerintah harus dipadukan

⁹ Majalah Nahdlatul Ulama AULA. *Kemandirian Ekonomi Umat*. 03/Tahun XXXVIII/Maret 2016. Hal, 12

untuk saling bekerja sama, bukan dikonflikkan untuk memenangkan satu pihak seraya mengalahkan pihak lainnya, *market versus government debate*. Sebab, kita tidak menginginkan sebuah pemerintahan otoritarian yang menenggelamkan peran pasar atau masyarakat, dan tidak pula kita menginginkan pasar liberal tanpa pemerintahan¹⁰.

Hanya dengan bekerja sama permasalahan sosial, seperti radikalisme terorisme akan dapat terselesaikan, oleh karena itu yang harus kita bangun adalah rasa percaya (*trust*) antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah sebagai penguasa legal formal harus melayani masyarakatnya dengan program-program dan kebijakuannya yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umum bukan mementingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dan masyarakat juga harus menjadi warga negara yang patuh akan aturan-aturan yang ada.

Harus diakui bahwa upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan umum, baik melalui politik, sosial agama maupun ekonomi sudah banyak dilakukan, seperti pemberian modal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), melindungi harga jual petani sampai pada pemberian pelatihan bagi para pelaku UMKM dan tidak lupa juga memberi fasilitas kemudahan bagi para pengusaha nasional. Namun harus diakui juga bahwa program-program tersebut terlebih dalam pemberdayaan ekonomi belum terlihat hasilnya secara signifikan. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha mikro yang “gulung tikar” akibat tekanan ekonomi dari luar, masih lemahnya daya beli petani dan masih banyak problem ekonomi lainnya. Tentu upaya mensejahterakan warga negara harus terus diupayakan sampai kapan pun, hal ini sebagaimana yang termaktub pada dasar dan ideologi negara ini, yakni UUD 1945 dan Pancasila.

C. Penutup

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil dua kesimpulan besar yakni penyebab dan upaya penanggulangan radikalisme terorisme di Indonesia, yakni:

Pertama, penyebab terjadinya radikalisme yang berujung pada tindak terorisme di Indonesia setidaknya-tidaknya ada tiga faktor, kesukuan, tindakan teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri

¹⁰ Agus Suman, 2009. *Ekonomika Politik dan Kesejahteraan*. Surabaya ITS Press. Hal, 29

akibat ketidakpuasan dengan pemerintahan yang ada. Radikalisme agama, yakni pemahaman agama secara teks semata tanpa mengaitkannya dengan konteks yang mengitarinya, sehingga menjadikan seseorang atau kelompok tertentu mengesahkan aksi terorisme sebagai cara untuk penegakan kebenaran versi mereka. Terakhir kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, sehingga orang-orang yang masuk kategori ini mudah saja dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang ekstrim, pemahanan-pemahaman yang radikal yang dapat megarah pada tindakan terorisme, atas nama mencari keadilan sosial ekonomi.

Kedua, pemberdayaan ekonomi sebagai penanggulangan paham radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme, pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhannya, yakni kebutuhan fisiologis (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan psikologis (keamanan, ketenangan, loyalitas dan penghargaan). Jika individu tersebut tidak mampu memperdayakan dirinya sendiri, maka suatu kelompok masyarakat dapat membantu mensejahterakan individu-individu tersebut melalui pemberdayaan ekonomi anggota kelompok, apalagi di Indonesia banyak sekali ormas-ormas baik yang berbadan hukum maupun tidak, baik yang berorientasi pada profit maupun sosial. Jika masing-masing ormas tersebut mampu mensejahterakan anggotanya, maka pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan umum. Terakhir pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan oleh pemerintah, baik melalui kementrian maupun departemen. Pemerintah sebagai penguasa yang memiliki legal formal, tentu akan mudah membuat sebuah program dan aturan main, sehingga Jika pasar gagal dalam menyediakan barang publik dan kesejahteraan umum, maka jalan tengahnya adalah pihak swasta (masyarakat) dan pemerintah harus dipadukan untuk saling bekerja sama, bukan dikonflikkan untuk memenangkan satu pihak seraya mengalahkan pihak lainnya, *market versus government debate*. Sebab, kita tidak menginginkan sebuah pemerintahan otoritarian yang menenggelamkan peran pasar atau masyarakat, dan tidak pula kita menginginkan pasar liberal tanpa pemerintahan.

Sebab-sebab terjadinya radikalisme yang berujung pada aksi terorisme berserta dengan upaya penangulangannya melalui pemberdayaan ekonomi umat, bukanlah klasifikasi secara mutlak, karena pada hakekatnya seseorang berfaham radikal yang mengarah pada terorisme dipengaruhi oleh banyak motif, dan pemberdayaan ekonomi adalah alternatif solusi untuk penanggulangan tindak terorisme, penangulangan tindak

terorisme tentu sangat beragam, tergantung siapa pelakunya, misalkan aparat negara tentu berbeda cara dalam menanggulangi terorisme dengan para ulama atau akakemisi, masing-masing memiliki cara yang sesuai dengan bidang masing-masing, namun yang jelas dan harus adalah keterpaduan dari setiap elemen masyarakat dalam penanggulangan paham radikalisme terorisme dilakukan secara sistematis dan terus menerus sampai akar permasalahan terselesaikan. Tanpa itu semua, maka kelompok terorisme akan terus berkembang dan mengancam keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, Nasir. (2015, Desember 7). *“Terorisme di Indonesia”*. Kuliah Terorisme dan Kontraterorisme, Program Pascasarjana Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Jakarta

Hasan, Noorhaidi. *Memahami Radikalisme*. (tidak dipublikasikan)

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.*, Bandung: Refika Aditama.

Suman , Agus, 2009. *Ekonomika Politik dan Kesejahteraan*. Surabaya : ITS Press.

Surya Bakti, A. (2014). *Darurat Terorisme Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.

M Umer Chapra. 1999. *Islam and The Economic Challenge*. (terj) Ihsan dan Amar. *Islam dan Tantangan Ekonomi Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.

Oni Sahroni dan Adiwarmanto A Karim. 2015. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam Sisteis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

Majalah Nahdlatul Ulama AULA. *Kemandirian Ekonomi Umat*. 03/Tahun XXXVIII/Maret 2016.

Moh. Hasyim Afandi. 2015. *Doktrin Shi’ah Membelengu Ukhuwah*. Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi. Vol. 13, No. 2 Agustus 2015. Nganjuk: STAIM Press.

<http://politikana.com/tag/penyebab/terorisme> di akses tanggal 19 Mei 2016

<http://jurnalintelijen.net/tag/penyebab-terorisme>. di akses tanggal 18 Mei 2016